

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak ialah pungutan yang dibayarkan kepada negara oleh orang pribadi atau organisasi/badan hukum berdasar undang-undang untuk digunakan bagi kepentingan negara juga kesejahteraan umum. Penagihan, pelayanan dan pengendalian pajak.

Pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor ialah pajak atas pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor menurut kesepakatan antara dua pihak atau karena perbuatan sepihak untuk membeli, menjual, menukar, mengalihkan, mewarisi atau memulai suatu usaha. Biaya antar jemput kendaraan bermotor dikenakan untuk antar jemput kendaraan bermotor. Pajak daerah ialah pajak wajib yang terutang oleh orang pribadi maupun badan terhadap daerah tanpa balasan dan digunakan untuk keperluan daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak daerah/kota. Pemungutan pajak daerah didasarkan pada definisi pemerintah daerah dan perhitungan wajib pajak itu sendiri.

Salah satu jenis pajak daerah yang menjadi sumber PAD terbesar diprovinsi kalimantan barat yaitu pajak kendaraan bermotor. Pemindahtanganan kendaraan beroda dua (motor) merupakan sumber utama penerimaan pajak daerah diprovinsi Kalimantan barat. Hal ini bisa dilihat pada kontribusinya yang besar terhadap pajak daerah. Bagian ini tercermin dalam tiga pajak yang ada dalam pajak provinsi Kalimantan barat, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Roda Dua (Motor).

Bea Balik Nama Kendaraan Roda Dua/Motor (BBNKB) adalah salah satu objek pajak yang pengaturan dan administrasinya diberikan pada pemda. Dengan memberikan kewenangan pengaturan dan administrasi BBNKB ke provinsi, diharapkan pendapatan akan bertambah setiap tahun seiring dengan

peningkatan jumlah kendaraan bermotor diprovinsi Kalimantan barat. Jika pendapatan daerah cukup menjanjikan, muncul pertanyaan tentang cara pemungutan pajak daerah. Pada dasarnya, cara pemungutan ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana mencapai tujuan yang telah ditetapkan disuatu daerah.

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial. Dalam hal ini UPT PPD Badan Pendapatan Daerah memegang peranan penting dalam pemerintahan daerah karena dapat menambah pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerahnya sendiri. Sejalan dengan hal tersebut, Pemkot melihat peluang yang sangat baik untuk menjadikan seluruh kendaraan bermotor milik Wajib Pajak dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PPN), yang terkait dengan pengembangan dan perluasan fungsi anggaran udara yang memerlukan tindakan pemkot. terus menggali sumber pendapatan - Sumber daya yang dimiliki dan dihargai yang berpotensi menghasilkan pendapatan bagi daerah.

Pajak Kendaraan Roda Dua dipungut atas kepemilikan dan pengelolaan kendaraan bermotor juga menjadi subjek pajak orang atau badan sebagai pemilik kendaraan bermotor bertanggung jawab untuk itu. Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Manfaat Pajak Daerah Nomor 28 Tahun 2009, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan roda dan gandengannya yang digunakan di segala jenis tanah dan digerakkan oleh peralatan teknis seperti mesin atau peralatan lain yang digunakan untuk konversi. sumber tenaga tertentu untuk pengoperasian kendaraan bermotor itu, termasuk mesin-mesin berat dan peralatan besar yang menggunakan roda dan mesin untuk pengoperasiannya dan tidak terpasang secara permanen, dan kendaraan bermotor yang sedang dipakai.

Maka dari itu, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai :

“MEKANISME PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BIYA BALIK NAMA UNTUK KENDARAAN BERMOTOR PERTAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SANGGAU KABUPATEN SANGGAU “

1.2 Rumusan Masalah

Namun nyatanya masih ada masyarakat di Kabupaten Sanggau yang tidak peduli dengan wajib pajak. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lokasi penelitian, masih ada masyarakat yang belum membayar pajak kendaraan.

Salah satu kewenangan yang bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor adalah kantor UPT PPD Kabupaten Sanggau.

Hal yang terjadi dilapangan bisa dilihat bahwa masyarakat masih enggan untuk membayar pajak pada kantor UPT PPD Wilayah Sanggau, adapun hal tersebut dikarenakan beberapa berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka penulis membatasi pembahasan agar tidak melebihi dan dapat di fokuskan pada satu bahasan dalam lingkup “ mekanisme pelaksanaan pemungutan biaya balik nama untuk kendaraan bermotor pertama UPT PPD wilayah sanggau kabupaten sanggau maka timbul permasalahan yaitu :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemungutan biaya balik nama untuk kendaraan bermotor pertama dikantor UPT PPD Wilayah Sanggau ?
2. Apa penyebab kurangnya atau tidak tercapainya penerimaan pada sektor BBN-KB 1 di Kantor UPT PPD Wilayah Sanggau ?
3. Bagaimana antusias masyarakat dalam membeli kendaraan baru yang berpengaruh pada sektor penerimaan BBN-KB 1 di Kantor UPT PPD Wilayah Sanggau ?

1.3 Tujuan Penulisan KTIA

Dalam Laporan Praktek Kerja Lapangan (LPKL) ini mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme sistem pelaksanaan pemungutan biaya balik nama untuk kendaraan beroda dua (motor) pertama pada kantor UPT PPD Wilayah Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan biaya balik nama untuk kendaraan roda dua (motor) pertama pada kantor UPT PPD Wilayah Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme sistem pelaksanaan pemungutan biaya balik nama untuk kendaraan bermotor pertama pada Kantor UPT PPD Wilayah Sanggau Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
4. Untuk memahami dan mengetahui apa saja tata cara dalam pelaksanaan pemungutan biaya balik nama untuk kendaraan bermotor pertama UPT PPD Wilayah Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penelitian ini adalah :

- a. Bagi Mahasiswa/i
 1. Bermanfaat untuk menambah wawasan dan penulisan pengetahuan dibidang pajak tentang bagaimana prosedur sistem pemungutan biaya balik nama untuk kendaraan roda dua (motor) pada Provinsi Kalimantan Barat.
 2. Untuk menambah ilmu pengetahuan, keterampilan dan dapat mempraktekkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan di Kampus Universitas Kristen Indonesia.
 3. Sebagai wadah untuk mempersiapkan diri menghadi dunia kerja dengan dibekali keahlian atau kemampuan dan

keterampilan serta pengalaman yang didapat selama melaksanakan praktek kerja lapangan.

4. Dapat menambah informasi, pengetahuan, dan wawasan tentang perhitungan bea balik nama kendaraan roda dua (motor) baru yang dari dealer dikenakan tarif sebesar 10%.

b. Bagi Universitas Kristen Indonesia (UKI)

1. Memberi informasi baru yang dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa lainnya yang ada didalam lingkungan kampus Universitas Kristen Indonesia.
2. Sebagai bahan penelitian perkembangan kegiatan belajar mengajar pada perkuliahan Universitas Kristen Indonesia Khususnya pada Program Studi Diploma Tiga Manajemen Pajak Fakultas Vokasi.

c. Bagi Perusahaan

Dapat menambah informasi bagi kebijakan pemerintah dengan adanya bea balik nama kendaraan bermotor

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Agar Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Akhir (KTIA) bisa lebih konsentrasi dan mendalam, maka penulis membatasi pembahasan yaitu, prosedur pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pertama Dikantor UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SANGGAU KABUPATEN SANGGAU.

1.6 Sistematika Penulisan KTIA

Sistem penulisan ini dipakai untuk mempermudah dalam memahami susunan Karya Tulisan Ilmiah Akhir. Laporan ini terbagi atas lima bab sebagai yakni :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini terdapat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup pembahasan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori ini berisi tentang definisi atau pengertian yang berhubungan dengan pengertian Pajak juga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai pedoman dalam pembahasan yang akan dibahas di Bab beerikutnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk menyusun karya tulis ilmiah akhir ini. Selanjutnya pada bab ini, penulis juga membahas tentang gambaran kantor UPT PPD di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai tempat magang bagi penulis.

BAB IV PEMBAHASAN

Pembahasan berisi hasil ataupun jawaban tentang pembahasan dari penelitian permasalahan yang dilakukan penulis sesuai dengan rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan juga saran dari penelitian yang telah dilakukan penulis.